

**FROM AI-ASSISTED LEARNING TO AI-ENABLED GOVERNANCE:
Model Performance Governance Pembelajaran Berbasis Artificial
Intelligence dalam Meningkatkan Mutu Layanan Akademik di FTIK UIN
Datokarama Palu**

¹Dr. Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd , ²Dr. H. Suharnis, S.Ag., M.Ag.

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

sjakirlobud@uindatokarama.ac.id , suharnis@uindatokaramapalu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah lanskap pendidikan tinggi secara fundamental. AI tidak lagi hanya diposisikan sebagai teknologi bantu untuk menghasilkan materi pembelajaran, merangkum bahan ajar, menerjemahkan teks, atau membantu mahasiswa menyelesaikan tugas, tetapi mulai memengaruhi cara perguruan tinggi merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pembelajaran. Persoalannya, pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi sering kali masih berada pada level AI-assisted learning, yaitu AI dipergunakan sebagai alat bantu individual oleh dosen dan mahasiswa, sementara dimensi tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, etika, pengendalian mutu, dan pengambilan keputusan berbasis data belum mendapatkan perhatian yang memadai. Artikel ini menawarkan gagasan transformasi dari AI-assisted learning menuju AI-enabled governance melalui model Performance Governance Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu. Model ini dibangun melalui integrasi teori Performance Management Armstrong, konsep New Public Governance, Digital Governance, Learning Analytics, Human-Centered AI, serta prinsip etika dan kompetensi AI dalam pendidikan. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa AI baru memberikan nilai strategis bagi perguruan tinggi apabila penggunaannya diintegrasikan dengan siklus tata kelola kinerja yang meliputi perencanaan, kesepakatan kinerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks FTIK sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, model tersebut diperkuat dengan nilai niyyah, amanah, itqan, muraqabah, muhasabah, dan islah. Dengan demikian, AI tidak ditempatkan sebagai pengganti dosen, melainkan sebagai intelligence infrastructure yang memperkuat kapasitas manusia dalam menghasilkan pembelajaran yang adaptif, transparan, akuntabel, personal, dan berorientasi pada mutu layanan akademik. Model yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual bagi transformasi digital FTIK dan pengembangan Islamic Performance Governance dalam menghadapi era kecerdasan artifisial.

Kata kunci: Artificial Intelligence, AI-Enabled Governance, Performance Governance, Learning Analytics, Mutu Layanan Akademik, FTIK, Perguruan Tinggi Islam.

1. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial sedang mengubah hampir seluruh ekosistem kehidupan manusia, termasuk pendidikan tinggi. Perubahan tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pedagogis, manajerial, organisasional, etis, dan tata kelola. Perguruan tinggi tidak lagi hanya dihadapkan pada pertanyaan apakah dosen dan mahasiswa boleh menggunakan AI, tetapi pada pertanyaan yang jauh lebih fundamental: bagaimana AI harus ditata kelola agar menghasilkan nilai pendidikan, meningkatkan kinerja akademik, dan memperbaiki mutu layanan kepada mahasiswa?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), karena fakultas ini tidak hanya menyelenggarakan proses pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan calon guru, pendidik, pengelola pendidikan, dan tenaga profesional yang nantinya akan berhadapan langsung dengan generasi masyarakat digital. Jika calon guru hanya diajarkan menggunakan AI sebagai alat teknis, maka pendidikan tinggi berpotensi menghasilkan pengguna teknologi. Namun apabila mahasiswa dibekali kemampuan memahami AI secara kritis, etis, pedagogis, dan tata kelola, maka perguruan tinggi dapat menghasilkan human resources yang mampu memimpin transformasi pendidikan berbasis AI.

Di sinilah letak persoalan yang sering terabaikan. Diskursus AI dalam pendidikan banyak berhenti pada pertanyaan: AI dapat digunakan untuk apa? AI dapat membuat materi kuliah, menghasilkan soal, menyusun RPS, memberikan ide penelitian, membuat presentasi, merangkum jurnal, menerjemahkan bahasa, memberikan umpan balik, bahkan membantu analisis data. Semua itu penting. Namun, pertanyaan yang lebih strategis adalah: bagaimana seluruh penggunaan AI tersebut diintegrasikan ke dalam sistem kinerja dan tata kelola perguruan tinggi?

Perubahan dari AI-assisted learning menuju AI-enabled governance menuntut perubahan paradigma, yaitu : paradigma pertama, AI diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran, paradigma kedua, AI diposisikan sebagai infrastruktur kecerdasan organisasi. Perbedaan keduanya sangat mendasar. AI-assisted learning berorientasi pada penggunaan teknologi dalam aktivitas pembelajaran individual. Dosen menggunakan AI untuk menyusun bahan ajar; mahasiswa menggunakannya untuk mencari ide; tenaga kependidikan menggunakannya untuk pekerjaan administratif. Sementara itu, AI-enabled governance menempatkan AI dalam sistem yang lebih luas: bagaimana data pembelajaran dikumpulkan, dianalisis, ditafsirkan, digunakan untuk mengambil keputusan, dimonitor, dievaluasi, dan dikonversikan menjadi kebijakan peningkatan mutu.

Dengan demikian, AI tidak lagi berdiri di luar sistem governance. AI menjadi bagian dari governance itu sendiri. UNESCO melalui Guidance for Generative AI in Education and Research menegaskan perlunya pendekatan yang berpusat pada manusia (human-centred approach), perlindungan privasi data, validasi etis dan pedagogis, serta pengembangan kebijakan kelembagaan yang koheren. Sementara itu, AI Competency Framework for Teachers UNESCO menempatkan kompetensi AI dalam lima dimensi, yaitu human-centred mindset, ethics of AI, AI foundations and applications, AI pedagogy, dan AI for professional learning. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi AI di pendidikan tidak dapat diserahkan semata-mata kepada kreativitas individu dosen dan mahasiswa. Diperlukan tata kelola kelembagaan.

Dalam konteks tersebut, konsep Performance Governance menjadi relevan, dimana Performance Governance menghubungkan tata kelola dengan pencapaian kinerja. Governance menjawab pertanyaan mengenai bagaimana organisasi diarahkan, dikendalikan, dipertanggungjawabkan, dan melibatkan para pemangku kepentingan, sedangkan performance menjawab pertanyaan mengenai apa yang dicapai, bagaimana

pencapaiannya diukur, dan bagaimana hasil tersebut diperbaiki. Karena itu, artikel ini menawarkan sebuah gagasan: AI dalam pendidikan tinggi harus bergerak dari sekadar teknologi pembelajaran menuju teknologi tata kelola kinerja pembelajaran.

Dalam konteks FTIK UIN Datokarama Palu, gagasan tersebut menjadi lebih strategis karena perguruan tinggi Islam memiliki karakteristik kelembagaan yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman. AI harus ditempatkan dalam kerangka kemanfaatan, amanah, kejujuran akademik, tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan: “Apakah FTIK menggunakan AI?” melainkan: “Seberapa baik FTIK menata kelola penggunaan AI untuk menghasilkan kinerja pembelajaran dan mutu layanan akademik yang lebih baik?” Perubahan pertanyaan tersebut sekaligus merupakan perubahan paradigma.

2. DARI AI-ASSISTED LEARNING MENUJU AI-ENABLED GOVERNANCE

Istilah AI-assisted learning menggambarkan fase awal pemanfaatan AI dalam pendidikan. Pada fase ini AI digunakan sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan AI sebagai tutor virtual, alat brainstorming, penerjemah, pemberi umpan balik, atau asisten penulisan. Dosen dapat memanfaatkannya untuk menyusun bahan ajar, merancang aktivitas pembelajaran, membuat soal, mengembangkan rubrik, atau mengolah informasi.

Manfaat tersebut tidak dapat diabaikan. Namun terdapat kelemahan fundamental apabila penggunaan AI berhenti pada level ini. AI yang hanya digunakan sebagai alat bantu individual dapat menciptakan fragmentasi. Dosen A memiliki pola penggunaan AI sendiri, dosen B menggunakan pendekatan berbeda, mahasiswa C menggunakan AI secara bertanggung jawab, sementara mahasiswa D mungkin menggunakannya sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas. Fakultas akhirnya memiliki banyak aktivitas AI, tetapi tidak memiliki AI governance.

Inilah paradoks transformasi digital: semakin banyak teknologi digunakan, belum tentu semakin baik tata kelolanya. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa governance dapat meningkatkan ketidakteraturan. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tanpa etika dapat mempercepat kesalahan. Teknologi dapat menghasilkan data, tetapi tanpa analitik dan keputusan yang tepat, data hanya menjadi arsip digital. Karena itu, AI-enabled governance merupakan tahap yang lebih tinggi. AI tidak lagi hanya membantu aktivitas pembelajaran, tetapi menjadi bagian dari mekanisme organisasi untuk meningkatkan kualitas keputusan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan.

Dalam kerangka ini, AI memiliki setidaknya lima fungsi strategis.

Pertama, AI sebagai learning intelligence. AI membantu membaca pola belajar mahasiswa, mengidentifikasi kesulitan, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran.

Kedua, AI sebagai performance intelligence. AI membantu mengidentifikasi capaian dan kesenjangan kinerja pembelajaran.

Ketiga, AI sebagai decision-support system. AI menyediakan informasi untuk membantu dosen, program studi, dan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Keempat, AI sebagai quality assurance infrastructure. Data pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung monitoring dan evaluasi mutu.

Kelima, AI sebagai continuous improvement mechanism. Hasil analisis tidak berhenti sebagai laporan, tetapi digunakan untuk melakukan perbaikan pembelajaran.

Dengan demikian, AI bergerak dari:

Tool → Assistant → Intelligence → Governance → Performance Improvement.

Inilah inti transformasi yang ditawarkan artikel ini.

3. LANDASAN TEORI PERFORMANCE MANAGEMENT

Salah satu teori utama yang dapat digunakan untuk membangun model ini adalah teori Performance Management dari Michael Armstrong. Armstrong memandang manajemen kinerja sebagai proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi, individu, dan tim. Performance management bukan hanya penilaian terhadap hasil akhir, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang menghubungkan tujuan organisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan.

Dalam konteks pembelajaran di FTIK, konsep tersebut dapat direkonstruksi menjadi siklus AI-Enabled Learning Performance Governance. Siklus tersebut meliputi:

Performance Planning → Performance Agreement → Performance Execution → Performance Monitoring → Performance Review → Performance Improvement.

3.1 Performance Planning

Perencanaan kinerja pembelajaran berbasis AI dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. AI tidak boleh menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan tetap ditentukan oleh dosen, program studi, dan institusi berdasarkan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan mahasiswa, dan visi kelembagaan. AI berfungsi membantu proses perencanaan. Misalnya, AI dapat membantu dosen melakukan pemetaan capaian pembelajaran, mengembangkan variasi aktivitas pembelajaran, menyusun alternatif asesmen, dan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang ditargetkan dengan aktivitas pembelajaran, namun, keputusan akhir tetap berada pada manusia.

Di sinilah prinsip human agency menjadi penting. UNESCO menekankan perlunya penguatan kompetensi AI yang tetap berorientasi pada manusia. Dalam konteks FTIK, perencanaan berbasis AI dapat dirumuskan:

Learning Objectives + Curriculum Data + Student Needs + AI Intelligence = AI-Supported Learning Planning.

4. PERFORMANCE AGREEMENT: MEMBANGUN KONTRAK AKADEMIK DI ERA AI

Tahap kedua adalah performance agreement.

Dalam manajemen kinerja, kesepakatan kinerja diperlukan agar pihak yang terlibat memahami target, indikator, tanggung jawab, dan standar yang harus dicapai. Dalam pembelajaran berbasis AI, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi AI Learning Agreement. Dosen dan mahasiswa perlu memahami sejak awal:

kapan AI boleh digunakan;

untuk aktivitas apa AI boleh digunakan;

kapan AI harus diungkapkan penggunaannya;

bagaimana sumber informasi diverifikasi;

bagaimana orisinalitas karya dipertanggungjawabkan;

bagaimana data pribadi dilindungi;

bagaimana keputusan akhir tetap berada pada manusia.

Persoalan ini sangat penting karena penggunaan AI tanpa aturan dapat mengaburkan batas antara pembelajaran dan outsourcing kognitif. Mahasiswa yang meminta AI menyusun seluruh tugas tanpa proses berpikir sendiri mungkin menghasilkan dokumen yang tampak baik, tetapi tidak menghasilkan pembelajaran yang sebenarnya. Karena itu, ukuran

keberhasilan bukan hanya produk akademik, tetapi juga proses kognitif yang menghasilkan produk tersebut.

Universitas di berbagai konteks telah merespons GenAI dengan kebijakan dan pedoman yang umumnya menekankan penggunaan yang bertanggung jawab, integritas akademik, privasi, akurasi, dan adaptasi desain asesmen. Maka, FTIK membutuhkan budaya akademik baru: AI boleh membantu berpikir, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab berpikir.

5. PERFORMANCE EXECUTION: AI SEBAGAI MITRA PEMBELAJARAN

Pada tahap performance execution, AI digunakan dalam proses aktual pembelajaran. Dosen dapat memanfaatkan AI untuk menciptakan variasi bahan ajar, simulasi, studi kasus, pertanyaan pemantik, umpan balik formatif, dan diferensiasi pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan AI untuk melakukan eksplorasi konsep, membandingkan perspektif, melakukan simulasi, menguji argumen, dan mendapatkan umpan balik awal. Namun, penggunaan AI harus didesain agar mendorong higher-order thinking, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar berikut :



Dalam model tersebut, AI bukan pusat pembelajaran. Manusia tetap pusatnya. AI harus memperluas kemampuan manusia, bukan menghapus kebutuhan manusia untuk berpikir. Karena itu, aktivitas pembelajaran yang berbasis AI harus mengandung unsur: 1. critical thinking, 2. problem solving, 3. Reflection, 4. Verification, 5. Argumentation, 6. Collaboration, ethical judgment. Jika tidak, AI justru dapat menciptakan ketergantungan.

6. PERFORMANCE MONITORING: DARI ASSESSMENT MENUJU LEARNING ANALYTICS

Inilah salah satu dimensi paling strategis dari model yang ditawarkan. Selama ini monitoring pembelajaran sering dilakukan melalui presensi, tugas, UTS, UAS, dan survei kepuasan mahasiswa. Pendekatan tersebut tetap penting, tetapi era AI memungkinkan pengembangan learning analytics yang lebih komprehensif. Learning analytics dapat membantu institusi membaca: 1. pola kehadiran, 2. aktivitas pembelajaran, 3. keterlibatan mahasiswa, 4. pola penyelesaian tugas, 5. capaian pembelajaran, 6. kesenjangan kompetensi, 7. kebutuhan dukungan akademik, 8. pola interaksi dalam lingkungan digital.

Namun, data tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran absolut. Data harus dibaca secara kontekstual. Misalnya, rendahnya aktivitas digital seorang mahasiswa tidak otomatis berarti mahasiswa tersebut tidak belajar. Bisa jadi ia belajar melalui buku, diskusi langsung, atau sumber lain, karena itu: Data $\neq$ Decision. Di antara data dan keputusan terdapat proses interpretasi manusia. Inilah alasan mengapa AI-enabled governance harus tetap bersifat human-centered.

7. PERFORMANCE REVIEW: DARI PENILAIAN MENUJU REFLEKSI ORGANISASIONAL

Performance review dalam model ini bukan sekadar menilai dosen atau mahasiswa. Performance review harus menjadi proses refleksi terhadap keseluruhan ekosistem pembelajaran. Pertanyaan yang harus diajukan adalah:

1. Apakah tujuan pembelajaran tercapai?
2. Apakah metode pembelajaran efektif?
3. Apakah AI meningkatkan kualitas pembelajaran?
4. Apakah AI meningkatkan keterlibatan mahasiswa?
5. Apakah AI menimbulkan ketergantungan?

6. Apakah mahasiswa semakin kritis atau justru semakin pasif?

7. Apakah terjadi kesenjangan akses?

8. Apakah penggunaan AI sudah etis?

9. Apakah data mahasiswa terlindungi?

10. Apakah mutu layanan akademik meningkat?

Dengan demikian, evaluasi berubah dari: “Siapa yang salah?” menjadi: “Apa yang harus diperbaiki?” Paradigma tersebut sangat dekat dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen kinerja.

8. PERFORMANCE IMPROVEMENT: AI UNTUK PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Tahap terakhir dalam siklus Armstrong adalah performance improvement. Hasil evaluasi harus menghasilkan tindakan. Jika data menunjukkan mahasiswa kesulitan memahami suatu mata kuliah, maka program studi dapat memperbaiki desain pembelajaran. Jika ditemukan bahwa mahasiswa terlalu bergantung pada AI, maka desain asesmen harus diubah.

Jika dosen memiliki tingkat literasi AI yang berbeda, maka fakultas perlu menyediakan pengembangan kompetensi. Jika terdapat risiko privasi, maka governance data harus diperkuat. Jika mahasiswa memiliki akses teknologi yang tidak sama, maka kebijakan inklusi digital harus dikembangkan.

Dengan demikian:

AI → Data → Insight → Decision → Action → Improvement.

Inilah rantai utama AI-enabled governance.

9. NEW PUBLIC GOVERNANCE DAN NILAI PUBLIK PENDIDIKAN

Konsep Performance Governance tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori governance. Dalam paradigma administrasi publik klasik, organisasi publik cenderung berorientasi pada hierarki, aturan, dan kontrol. New Public Management kemudian memperkuat orientasi terhadap efisiensi, kinerja, output, dan pengukuran. Sementara itu, New Public Governance memberikan perhatian lebih besar pada jaringan, kolaborasi, partisipasi, hubungan antaraktor, dan penciptaan nilai publik.

Perguruan tinggi Islam merupakan organisasi publik/pendidikan yang memiliki banyak pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas, program studi, orang tua, pemerintah, masyarakat, dunia kerja, organisasi profesi, dan komunitas keagamaan. Karena itu, governance pembelajaran tidak dapat hanya diputuskan secara top-down. AI-enabled governance harus bersifat multi-actor governance. Mahasiswa bukan sekadar objek layanan. Dosen bukan sekadar pelaksana kebijakan. Pimpinan bukan sekadar pengendali. Tenaga kependidikan bukan sekadar administrator. Semua menjadi bagian dari ekosistem penciptaan nilai akademik.

Dalam perspektif public value, keberhasilan pendidikan tinggi bukan semata-mata diukur dari banyaknya mahasiswa yang lulus, tetapi dari nilai yang dihasilkan bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dengan demikian, AI harus ditanya bukan hanya: “Apakah AI membuat pekerjaan lebih cepat?” tetapi: “Apakah AI menghasilkan public value pendidikan yang lebih besar?”

10. DIGITAL GOVERNANCE DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Digital governance menempatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses pemerintahan dan organisasi, bukan sekadar sebagai perangkat tambahan. Dalam konteks perguruan tinggi, digital governance berarti seluruh proses akademik dan administratif mulai bergerak menuju sistem

yang terintegrasi, berbasis data, transparan, responsif, dan adaptif. AI memperluas digital governance menjadi intelligent governance.

Digital governance:

Data → Information → Service

AI-enabled governance:

Data → Information → Intelligence → Decision → Action → Performance Improvement.

Perbedaannya sangat signifikan. Digitalisasi hanya mengubah bentuk pekerjaan. AI-enabled governance berpotensi mengubah cara organisasi mengetahui, memutuskan, dan bertindak. Karena itu, implementasi AI di FTIK tidak seharusnya dipandang sebagai proyek teknologi semata. Ia merupakan proyek perubahan organisasi.

11. HUMAN-CENTERED AI: MANUSIA TETAP MENJADI PUSAT

Salah satu bahaya terbesar AI dalam pendidikan adalah munculnya technological determinism, yaitu anggapan bahwa teknologi secara otomatis menghasilkan kemajuan. Padahal teknologi tidak netral dalam penggunaannya. AI dapat menghasilkan manfaat, tetapi juga risiko. AI dapat meningkatkan personalisasi pembelajaran, tetapi juga berpotensi menghasilkan bias. AI dapat mempercepat pekerjaan, tetapi juga dapat mengurangi proses berpikir. AI dapat membantu evaluasi, tetapi juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak transparan. AI dapat menghasilkan informasi, tetapi informasi tersebut tidak selalu benar.

Karena itu, paradigma human-centered AI menjadi penting. UNESCO menempatkan pendekatan yang berpusat pada manusia, perlindungan hak, human agency, etika, dan keberlanjutan sebagai prinsip penting dalam pengembangan kompetensi AI bagi guru. Dalam konteks FTIK, prinsip tersebut dapat dirumuskan menjadi lima prinsip:

1. Human Agency

Keputusan akademik tetap berada pada manusia.

2. Human Accountability

Dosen dan pimpinan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

3. Transparency

Penggunaan AI harus dapat dijelaskan.

4. Fairness

AI tidak boleh memperkuat ketidakadilan akademik.

5. Data Protection

Data mahasiswa dan sivitas akademika harus dilindungi. Dengan demikian: AI assists. Humans decide. Institutions govern.

12. AI DAN MUTU LAYANAN AKADEMIK

Mutu layanan akademik menjadi tujuan akhir model ini. Mutu layanan akademik dapat dipahami melalui berbagai perspektif, salah satunya SERVQUAL dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang menekankan dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam era AI, dimensi tersebut dapat direkonstruksi.

Reliability : AI dapat membantu menyediakan informasi akademik yang lebih konsisten, tetapi harus melalui validasi manusia, **Responsiveness** : AI dapat mempercepat respons terhadap pertanyaan mahasiswa, **Assurance** : AI dapat mendukung pemberian informasi akademik yang lebih sistematis apabila sumber dan prosedurnya jelas, **Empathy** : AI dapat membantu mendeteksi kebutuhan mahasiswa, tetapi empati tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mesin, **Tangibles** : Infrastruktur digital menjadi bagian dari pengalaman layanan akademik.

Dengan demikian, AI dapat meningkatkan mutu layanan, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan layanan bermutu. Kualitas tetap bergantung pada governance.

13. PERFORMANCE GOVERNANCE SEBAGAI JEMBATAN ANTARA AI DAN MUTU

Di sinilah kontribusi konseptual utama artikel ini. AI bukan variabel yang secara otomatis meningkatkan mutu layanan. Terdapat mekanisme yang menghubungkan keduanya. Mekanisme tersebut adalah Performance Governance. Secara sederhana:

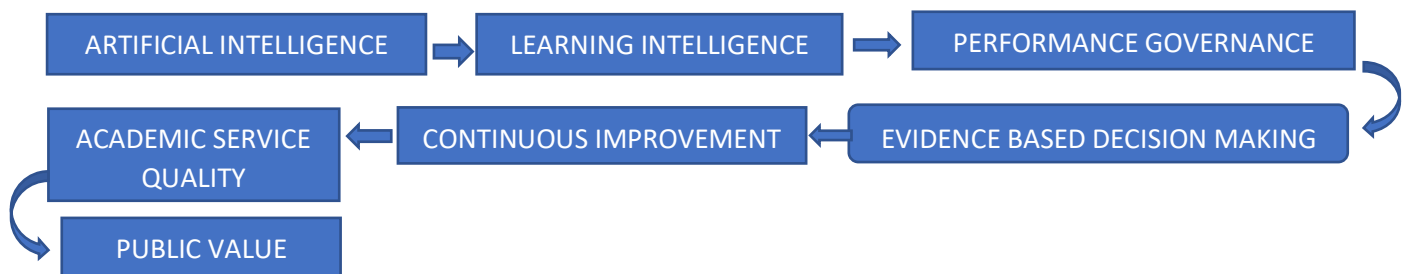
AI → Performance Governance → Academic Service Quality

AI menyediakan kapasitas teknologi.

Performance Governance menyediakan sistem pengelolaan.

Mutu layanan merupakan outcome.

Dengan demikian, hubungan tersebut dapat dirumuskan:



Gambar 1 : Hubungan Performance Governance

Model tersebut menunjukkan bahwa AI harus ditempatkan dalam sistem.

Tanpa governance: **AI** → **Efficiency**. Dengan governance:

AI → **Intelligence** → **Accountability** → **Improvement** → **Quality** → **Public Value**.

14. REKONSTRUKSI ISLAMIC PERFORMANCE GOVERNANCE

Karena objek kajian berada di FTIK UIN Datokarama Palu, maka model ini perlu memiliki dimensi nilai Islam. AI tidak boleh diperlakukan sebagai teknologi bebas nilai. Dalam tradisi Islam, teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan dan dijalankan dengan amanah. Konsep ini dapat diintegrasikan dengan model Islamic Performance Governance.

14.1 Niyyah-Based Planning

Perencanaan harus berangkat dari niat yang benar. AI digunakan bukan sekadar mengejar efisiensi, tetapi meningkatkan mutu pendidikan dan kemaslahatan mahasiswa.

14.2 Amanah-Based Agreement

Penggunaan AI merupakan amanah. Dosen bertanggung jawab terhadap materi yang dihasilkan. Mahasiswa bertanggung jawab terhadap karya yang dikumpulkan. Pimpinan bertanggung jawab terhadap kebijakan AI.

14.3 Itqan-Oriented Execution

Pelaksanaan pembelajaran harus diarahkan pada kualitas terbaik. AI digunakan untuk membantu mencapai itqan, bukan untuk menghindari kerja akademik.

14.4 Muraqabah-Based Monitoring

Monitoring dilakukan dengan kesadaran bahwa setiap aktivitas akademik memiliki dimensi moral. Muraqabah memberikan fondasi etik bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk manipulasi, plagiarisme, kecurangan, atau penyalahgunaan data.

14.5 Muhasabah-Based Review

Evaluasi bukan sekadar pengukuran angka, tetapi refleksi. Apa yang berhasil? Apa yang gagal? Apa yang merugikan mahasiswa? Apa yang perlu diperbaiki?

14.6 Islah-Based Improvement

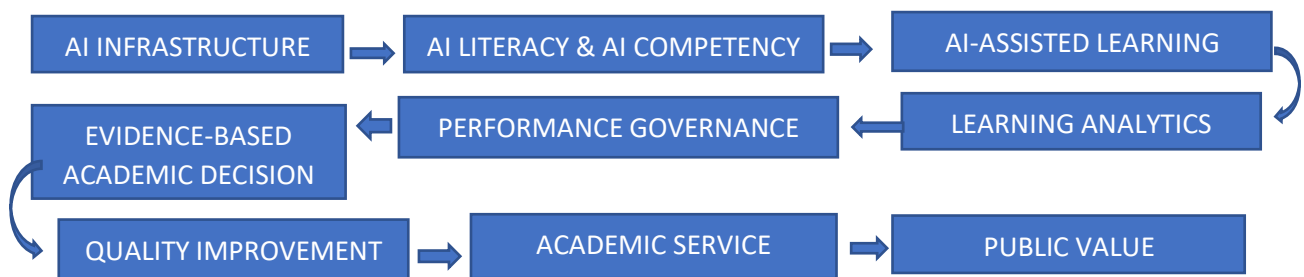
Perbaikan harus diarahkan pada islah, yaitu perbaikan yang menghasilkan kemaslahatan. Dengan demikian, siklus model dapat dirumuskan:

NIYYAH → AMANAH → ITQAN → MURAQABAH → MUHASABAH → ISLAH

dan kemudian kembali kepada: NIYYAH, sehingga membentuk siklus tata kelola kinerja pembelajaran yang berkelanjutan.

15. MODEL AI-ENABLED LEARNING PERFORMANCE GOVERNANCE

Berdasarkan integrasi teori tersebut, artikel ini menawarkan model konseptual sebagai berikut:



Gambar 2 : Model AI Enabled Learning Performance Governance

Model tersebut memiliki enam dimensi utama:

Dimensi 1 — AI-Enabled Planning

AI digunakan untuk mendukung perencanaan pembelajaran berbasis data.

Dimensi 2 — AI-Enabled Execution

AI digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang adaptif dan personal.

Dimensi 3 — AI-Enabled Monitoring

AI dan learning analytics digunakan untuk membaca perkembangan pembelajaran.

Dimensi 4 — AI-Enabled Evaluation

Data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran.

Dimensi 5 — AI-Enabled Decision Making

Informasi berbasis AI digunakan untuk mendukung keputusan akademik.

Dimensi 6 — AI-Enabled Continuous Improvement

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kurikulum, pembelajaran, layanan, dan pengembangan dosen.

16. DOSEN: DARI KNOWLEDGE TRANSMITTER MENJADI LEARNING GOVERNOR

Transformasi AI tidak berarti menghilangkan peran dosen. Justru sebaliknya, semakin kuat AI, semakin penting peran dosen sebagai manusia yang memiliki otoritas akademik, etika, pedagogi, dan kebijaksanaan. Dosen tidak lagi hanya berperan sebagai knowledge transmitter.

Dosen berkembang menjadi: 1. Learning Designer, 2. Learning Facilitator, 3. AI Curator, 4. Learning Analyst, 5. Academic Mentor, 6. Ethical Governor.

Perubahan tersebut membutuhkan kompetensi baru. UNESCO mengidentifikasi 15 kompetensi guru dalam lima dimensi AI, termasuk pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, fondasi dan aplikasi AI, pedagogi AI, serta AI untuk pengembangan profesional. Karena itu, transformasi AI di FTIK harus dibarengi dengan faculty development. Tidak cukup memberikan dosen akses kepada aplikasi AI. Dosen harus memahami: bagaimana AI bekerja, apa keterbatasannya, bagaimana mengevaluasi output, bagaimana mendesain pembelajaran dengan AI, bagaimana menjaga integritas akademik, bagaimana melindungi data, bagaimana menggunakan AI secara etis.

17. MAHASISWA: DARI AI USER MENJADI AI-CRITICAL LEARNER

Mahasiswa juga harus mengalami perubahan. Mahasiswa tidak cukup menjadi pengguna AI. Mereka harus menjadi AI-critical learner. Artinya mahasiswa mampu: menggunakan AI, mempertanyakan output AI,

memverifikasi informasi, membandingkan sumber, mengidentifikasi bias, menyusun argumentasi sendiri, mengungkapkan penggunaan AI, bertanggung jawab terhadap karya akademik.

Dengan demikian, kompetensi AI bukan hanya prompting skill. Kompetensi AI adalah:

Technical Skill + Critical Thinking + Ethical Judgment + Academic Integrity + Human Responsibility.

Inilah kompetensi yang lebih relevan bagi calon guru di FTIK.

18. PIMPINAN FAKULTAS SEBAGAI AI GOVERNANCE LEADER

Transformasi AI juga mengubah peran pimpinan. Pimpinan fakultas tidak cukup bertanya: “Apakah dosen sudah menggunakan AI?” Pimpinan harus bertanya: “Apakah penggunaan AI sudah menghasilkan peningkatan kinerja?” Pertanyaan berikutnya: “Apakah peningkatan kinerja tersebut menghasilkan peningkatan mutu layanan?” Dan: “Apakah peningkatan mutu tersebut menghasilkan public value?”

Dengan demikian, pimpinan menjadi AI Governance Leader. Perannya meliputi: 1. Membangun kebijakan, 2. Menyediakan infrastruktur, 3. Membangun kompetensi, 4. Menetapkan indicator, 5. Melindungi data, 6. Menjamin etika, 7. Mengembangkan budaya inovasi, 8. Memonitor kinerja, 9. Memastikan continuous improvement.

Kajian mengenai governance AI di pendidikan tinggi menunjukkan pentingnya pengaturan lintas unit, pembagian tanggung jawab berdasarkan peran, dan karakteristik akademik dalam governance AI.

19. TANTANGAN IMPLEMENTASI DI FTIK

Implementasi model tidak bebas dari tantangan yaitu :

Pertama, digital divide.

Tidak semua dosen dan mahasiswa memiliki akses dan kompetensi teknologi yang sama.

Kedua, AI literacy gap.

Sebagian sivitas akademika mungkin sudah sangat terbiasa menggunakan AI, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap awal.

Ketiga, academic integrity.

AI dapat digunakan untuk melakukan plagiarisme, manipulasi, atau outsourcing pekerjaan kognitif.

Keempat, hallucination.

AI dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi salah.

Kelima, privacy.

Data mahasiswa merupakan informasi yang harus dilindungi.

Keenam, algorithmic bias.

Sistem AI dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang bias.

Ketujuh, resistance to change.

Sebagian individu dapat memandang AI sebagai ancaman terhadap profesinya.

Kedelapan, overdependence.

Penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi kemandirian berpikir. Karena itu, implementasi AI membutuhkan governance yang kuat.

20. STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL

Model ini dapat diterapkan secara bertahap.

Tahap pertama: AI Readiness Assessment

FTIK melakukan pemetaan: kompetensi dosen; kompetensi mahasiswa; infrastruktur; kebijakan; penggunaan AI; kebutuhan pelatihan.

Tahap kedua: AI Governance Policy

Fakultas menyusun kebijakan penggunaan AI.

Tahap ketiga: AI Competency Development

Dosen dan mahasiswa diberikan pelatihan.

Tahap keempat: AI Learning Integration

AI mulai diintegrasikan ke dalam pembelajaran.

Tahap kelima: Learning Analytics

Data pembelajaran mulai dimanfaatkan untuk monitoring.

Tahap keenam: Performance Governance

Data digunakan dalam siklus perencanaan, monitoring, evaluasi, dan improvement.

Tahap ketujuh: Continuous Improvement

Model dievaluasi dan dikembangkan secara berkala.

21. INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL

Kebhasilan AI-enabled governance tidak boleh hanya diukur dari jumlah dosen yang menggunakan AI. Indikator harus lebih komprehensif meliputi : **Input**, Infrastruktur AI, kompetensi digital, kebijakan, sumber daya manusia. Selanjutnya untuk **Process** : tingkat integrasi AI, kualitas desain pembelajaran, kepatuhan terhadap etika, penggunaan learning analytics. Selanjutnya adalah **Output** meliputi : peningkatan kualitas bahan ajar, peningkatan respons layanan, peningkatan efektivitas pembelajaran, peningkatan keterlibatan mahasiswa. Begitu pula dengan **Outcome** meliputi : peningkatan capaian pembelajaran, peningkatan kepuasan mahasiswa,

peningkatan kinerja dosen, peningkatan mutu layanan akademik. Dan yang terakhir adalah **Impact** yaitu : peningkatan kualitas lulusan, peningkatan public value, peningkatan reputasi akademik, peningkatan daya adaptasi FTIK terhadap perubahan teknologi.

22. NOVELTY: DARI TECHNOLOGY ADOPTION MENUJU PERFORMANCE GOVERNANCE

Novelty artikel ini terletak pada perubahan cara melihat AI. Sebagian kajian AI dalam pendidikan bertanya: Apakah AI efektif? Sebagian lainnya bertanya: Bagaimana dosen menggunakan AI? Sebagian fokus pada: Bagaimana mahasiswa menerima AI? . Artikel ini mengajukan pertanyaan berbeda:

Bagaimana AI ditata kelola sebagai sistem manajemen kinerja pembelajaran untuk meningkatkan mutu layanan akademik? Perbedaan tersebut penting. AI bukan lagi independent tool. AI menjadi bagian dari governance mechanism. Dengan demikian, novelty konseptual artikel ini adalah: AI-Enabled Performance Governance yang mengintegrasikan: Artificial Intelligence, Performance Management, Learning Analytics, Digital Governance, Human-Centered AI, Islamic Governance Values, untuk menghasilkan: Academic Service Quality.

23. PROPOSISI KONSEPTUAL

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini dapat menghasilkan beberapa proposisi.

Proposisi 1 : Semakin baik kompetensi AI dosen dan mahasiswa, semakin besar kemampuan institusi mengintegrasikan AI secara produktif dalam pembelajaran.

Proposisi 2 : Integrasi AI dalam pembelajaran tidak secara otomatis meningkatkan mutu layanan akademik tanpa mekanisme performance governance.

Proposisi 3 : Learning analytics memperkuat hubungan antara penggunaan AI dan pengambilan keputusan akademik berbasis bukti.

Proposisi 4 : Performance governance memediasi pengaruh pemanfaatan AI terhadap mutu layanan akademik.

Proposisi 5 : Human-centered AI memperkuat legitimasi, etika, dan akuntabilitas AI dalam pendidikan tinggi.

Proposisi 6 : Integrasi nilai-nilai Islam memperkuat dimensi etis dan moral dalam AI-enabled performance governance pada perguruan tinggi Islam.

Proposisi 7 : Continuous improvement menjadi mekanisme utama yang mengubah intelligence yang dihasilkan AI menjadi peningkatan mutu layanan akademik.

24. IMPLIKASI TEORITIS

Secara teoritis, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Performance Governance. Selama ini performance management sering berfokus pada hubungan antara target, indikator, evaluasi, dan hasil. AI memungkinkan sistem tersebut berkembang menjadi lebih adaptif. Data pembelajaran dapat dianalisis lebih cepat. Pola kinerja dapat diidentifikasi lebih awal. Intervensi dapat diberikan lebih cepat.

Dengan demikian, AI berpotensi mengubah performance governance dari: Reactive Performance Governance menjadi: Predictive and Adaptive Performance Governance. Governance tidak lagi hanya bertindak setelah masalah terjadi. Governance dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Namun, prediksi tidak boleh berubah menjadi determinisme.

AI dapat mengatakan: “Ada kemungkinan mahasiswa mengalami kesulitan.” Tetapi keputusan akademik tetap harus melalui penilaian manusia. Inilah perbedaan antara AI-supported governance dan AI-controlled governance. Artikel ini secara tegas memilih yang pertama.

25. IMPLIKASI PRAKTIS BAGI FTIK UIN DATOKARAMA PALU

Bagi FTIK UIN Datokarama Palu, model ini dapat menjadi dasar pengembangan roadmap transformasi pembelajaran. FTIK dapat membangun: FTIK AI Learning Governance Ecosystem yang terdiri atas: AI Policy, AI Competency Center, AI Learning Platform, Learning Analytics Dashboard, Academic Performance Dashboard, AI Ethics Framework, Faculty Development Program, Student AI Literacy Program, AI-Based Quality Assurance, Continuous Improvement System. Dengan demikian, AI tidak menjadi fenomena individual. AI menjadi institutional capability.

26. AI DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sekadar digitalisasi. Ia harus menjawab pertanyaan: Bagaimana teknologi modern dapat berjalan bersama nilai Islam? Bagaimana AI dapat memperkuat ilmu tanpa melemahkan adab? Bagaimana kecerdasan mesin dapat berjalan bersama kecerdasan moral? Bagaimana efisiensi dapat berjalan bersama amanah? Bagaimana otomatisasi dapat berjalan bersama kemanusiaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masa depan pendidikan Islam bukanlah memilih antara teknologi atau nilai agama. Pilihan yang lebih tepat adalah: teknologi yang ditata oleh nilai. AI harus menjadi alat untuk memperkuat manusia. Bukan manusia yang kehilangan kemanusiaannya karena AI. Dalam perspektif ini, FTIK memiliki peluang strategis. FTIK tidak hanya dapat menjadi pengguna AI. FTIK dapat menjadi laboratorium AI governance pendidikan Islam.

27. MODEL FINAL: AI-ENABLED ISLAMIC PERFORMANCE GOVERNANCE

Berdasarkan seluruh argumentasi, model final dapat dirumuskan sebagai berikut:

AI INFRASTRUCTURE > AI COMPETENCY > AI-ASSISTED LEARNING > LEARNING ANALYTICS > AI-ENABLED PERFORMANCE GOVERNANCE > NIYYAH > AMANAH > ITQAN > MURAQABAH > MUHASABAH > ISLAH > EVIDENCE-BASED DECISION MAKING > CONTINUOUS IMPROVEMENT > QUALITY ACADEMIC SERVICES > PUBLIC VALUE > EDUCATIONAL EXCELLENCE

Model tersebut menunjukkan bahwa AI bukan titik akhir. AI adalah enabler. Performance Governance adalah mechanism. Nilai Islam adalah ethical compass. Mutu layanan akademik adalah outcome. Public value adalah impact.

28. KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence telah mengubah cara perguruan tinggi menjalankan pembelajaran. Namun, tantangan terbesar bukan lagi bagaimana menggunakan AI, melainkan bagaimana menata penggunaan AI agar menghasilkan kinerja akademik dan mutu layanan yang lebih baik.

Artikel ini menawarkan transformasi paradigma dari AI-assisted learning menuju AI-enabled governance. Dalam paradigma AI-assisted learning, AI ditempatkan sebagai alat bantu individual. Dalam paradigma AI-enabled governance, AI menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan kinerja pembelajaran.

Model yang ditawarkan mengintegrasikan teori Performance Management Armstrong dengan Digital Governance, New Public Governance, Learning Analytics, Human-Centered AI, dan prinsip kompetensi AI UNESCO. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, model tersebut diperkuat dengan nilai niyyah, amanah, itqan, muraqabah, muhasabah, dan islah.

Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa AI tidak otomatis menghasilkan mutu. AI menghasilkan data. Data menghasilkan informasi.

Informasi menghasilkan intelligence. Tetapi intelligence hanya menjadi kinerja apabila ditata kelola. Karena itu: AI tanpa governance hanya menghasilkan teknologi. Governance tanpa intelligence menghasilkan birokrasi yang lambat. Performance Governance tanpa nilai dapat menghasilkan efisiensi tanpa moralitas.

Namun AI yang ditata melalui Performance Governance dan diarahkan oleh nilai kemanusiaan serta nilai Islam dapat menghasilkan intelligent, ethical, accountable, adaptive, and quality-oriented academic services. Dalam konteks FTIK UIN Datokarama Palu, transformasi ini dapat menjadi peluang strategis untuk membangun model pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu mengendalikan teknologi berdasarkan nilai.

Dengan demikian, masa depan pembelajaran bukan: Human OR AI. Bukan pula: Teacher OR Technology. Melainkan: Human + AI + Governance + Ethics + Performance. Pada titik inilah konsep AI-Enabled Performance Governance menemukan relevansinya. AI tidak menggantikan dosen. AI memperkuat dosen. AI tidak menggantikan mahasiswa. AI memperluas kapasitas belajar mahasiswa. AI tidak menggantikan pimpinan. AI memperkuat kapasitas pengambilan keputusan pimpinan. Dan AI tidak menggantikan governance. AI justru membutuhkan governance agar kecerdasannya menghasilkan nilai. Oleh karena itu, transformasi FTIK di era kecerdasan artifisial harus diarahkan bukan hanya menjadi AI-enabled learning institution, tetapi menjadi AI-enabled learning governance institution—sebuah institusi pendidikan tinggi yang mampu menggunakan kecerdasan artifisial untuk memperkuat kecerdasan manusia, meningkatkan kinerja organisasi, menjaga integritas akademik, memperbaiki mutu layanan, dan pada akhirnya menciptakan public value pendidikan yang berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Aguinis, H. (2019). *Performance Management*. Chicago: Chicago Business Press.
- Armstrong, M. (2021). *Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance*. London: Kogan Page.
- Bacal, R. (1999). *Performance Management*. New York: McGraw-Hill.
- Barnard, C. I. (1938). *The Functions of the Executive*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public Management and Governance*. London: Routledge.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Hoboken: Wiley.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Chan, C. K. Y. (2023). *A Comprehensive AI Policy Education Framework for University Teaching and Learning*.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Kettl, D. F. (2002). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McDonald, N., Johri, A., Ali, A., & Hingle, A. (2024). Generative artificial intelligence in higher education: Evidence from an analysis of institutional policies and guidelines.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge: Harvard University Press.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2024). *AI Competency Framework for Teachers*. Paris: UNESCO.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wu, C., Zhang, H., & Carroll, J. M. (2024). *AI Governance in Higher Education: Case Studies of Guidance at Big Ten Universities*.